

PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN: STUDI LITERATUR PADA KOTA PEKANBARU

Adianto¹, Adinda Tiara Nabilla Harefa², Imam Suryadi³

^{1,2,3)}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

email: adianto@lecturer.unri.ac.id¹, adinda.tiara2111@student.unri.ac.id²,

imam.suryadi5066@student.unri.ac.id³

Abstrak

Kelembagaan lokal menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah. Di Kota Pekanbaru, implementasi pembangunan berbasis masyarakat terus digalakkan melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program pemberdayaan kelurahan, penataan lingkungan, serta penguatan kapasitas lembaga masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis peran kelembagaan lokal dalam pembangunan partisipatif di Pekanbaru, tantangan yang muncul, serta strategi perbaikan ke depan. Data dianalisis dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional terindeks, dokumen resmi pemerintah daerah, dan laporan program pengembangan masyarakat tahun 2015–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga lokal seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), RT/RW, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lain berperan dalam penguatan kapasitas warga, peningkatan akses informasi, dan pengawasan pembangunan. Namun praktik yang berjalan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi substantif, akses data yang terbatas, minimnya anggaran kelembagaan, serta lemahnya inovasi dalam tata kelola berbasis digital. Kajian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM kelembagaan, peningkatan transparansi melalui digitalisasi layanan, serta kolaborasi multipihak sebagai strategi optimalisasi pembangunan partisipatif ke depan.

Kata Kunci: Kelembagaan Lokal, Pembangunan Partisipatif, Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola Lokal, Pekanbaru.

Abstract

Local institutions are a crucial pillar in realizing inclusive and sustainable participatory development at the regional level. In Pekanbaru City, the implementation of community-based development continues to be promoted through various government policies, including village empowerment programs, environmental planning, and strengthening the capacity of community organizations. This study uses a literature review method to analyze the role of local institutions in participatory development in Pekanbaru, the challenges they face, and strategies for future improvement. Data were analyzed from scientific books, indexed national journal articles, official local government documents, and community development program reports from 2015–2025. The study results indicate that local institutions such as Community Empowerment Institutions (LPM), Community Empowerment Agencies (BKM), neighborhood associations (RT/RW), youth organizations (Karang Taruna), and other community groups play a role in strengthening community capacity, increasing access to information, and overseeing development. However, current practices still face various obstacles, such as a lack of substantive participation, limited data access, minimal institutional budgets, and weak innovation in digital-based governance. This study recommends strengthening institutional human resource capacity, increasing transparency through service digitization, and multi-stakeholder collaboration as strategies for optimizing participatory development going forward.

Keywords: Local Institutions, Participatory Development, Community Empowerment, Local Governance, Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam keseluruhan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Pendekatan ini diyakini lebih mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal dibandingkan model pembangunan yang bersifat top-down. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar keterlibatan fisik dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan secara substantif, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif menjadi bagian penting dalam

implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bertumpu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas.

Kota Pekanbaru sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam dua dekade terakhir. Transformasi kota yang pesat menyebabkan munculnya tantangan perkotaan yang semakin kompleks, seperti peningkatan kawasan kumuh di beberapa kelurahan, pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan layanan infrastruktur, persoalan kemiskinan perkotaan, ketimpangan akses pelayanan publik, serta masalah lingkungan seperti sampah dan banjir yang masih berulang setiap tahun. Kondisi ini menuntut adanya penguatan tata kelola pembangunan di tingkat akar rumput agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru, dinamika pertumbuhan penduduk serta tantangan pengelolaan permukiman menunjukkan adanya kebutuhan penguatan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Data berikut memperlihatkan:



Gambar 1 Data Statistik Jumlah Penduduk Menurut Lima Tahun Terakhir
Sumber: Databoks

Dalam konteks tersebut, keberadaan kelembagaan lokal seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), RT/RW, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat berbasis komunitas menjadi sangat strategis. Kelembagaan lokal berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyampaian kebutuhan pembangunan, pendampingan program pemberdayaan, serta pengawasan dalam implementasi pembangunan fisik dan sosial di tingkat lingkungan. Selain itu, kelembagaan lokal juga mengambil peran dalam peningkatan kapasitas warga serta mendorong masyarakat lebih aktif dalam forum perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan hingga kota.

Penguatan kelembagaan lokal di Pekanbaru juga tidak terlepas dari sejumlah program nasional yang mendorong percepatan pembangunan partisipatif, seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Dana Kelurahan, dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mewajibkan proses konsultasi publik. Melalui program-program tersebut, pemerintah mendorong supaya pembangunan tidak hanya menjadi domain birokrasi, tetapi juga didukung oleh kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat (beneficiaries), tetapi sebagai pelaku aktif dan pengendali pembangunan di wilayahnya.

Namun, meskipun dukungan kebijakan sudah ada, implementasi pembangunan partisipatif di Pekanbaru belum berjalan optimal. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih bersifat formalitas atau ceremonial, kapasitas sumber daya manusia kelembagaan lokal belum merata, dukungan anggaran kelembagaan masih terbatas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi pembangunan masih rendah. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa perencanaan pembangunan masih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan belum sepenuhnya berdasarkan data atau aspirasi warga yang komprehensif.

Kesenjangan antara konsep dan realitas inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian berbasis studi literatur untuk mengidentifikasi peran aktual kelembagaan lokal dalam pembangunan partisipatif di Kota Pekanbaru, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat efektivitas tata kelola pembangunan di masa mendatang. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi praktis bagi

pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat melalui penguatan kelembagaan lokal guna mendukung pembangunan kota yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berfokus pada kajian konseptual dan hasil-hasil penelitian mengenai perencanaan pembangunan partisipatif dan pembangunan kelembagaan lokal, khususnya yang relevan dengan konteks Kota Pekanbaru. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai teori, konsep, model kebijakan, serta evaluasi empiris program pembangunan yang telah dilakukan pada wilayah lainnya untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi di Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara langsung, melainkan mengandalkan sumber informasi ilmiah yang telah tersedia.

Jenis studi literatur yang digunakan adalah literature review deskriptif, yaitu proses meninjau serta mendeskripsikan perkembangan pengetahuan dan hasil penelitian terdahulu berdasarkan tema tertentu secara menyeluruh dan mendalam. Metode ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi celah penelitian (research gap), perbedaan hasil studi sebelumnya, serta peluang pengembangan teori dan rekomendasi implementatif bagi penguatan kelembagaan lokal dalam pembangunan daerah.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari literatur-literatur ilmiah terpublikasi. Data dikumpulkan dari berbagai jenis literatur: publikasi jurnal nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan dan program pemerintah (termasuk dokumen perencanaan daerah, laporan program, data demografi), serta laporan penelitian dan studi kasus terkait periode 2015–2025.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara daring melalui proses penelusuran berbagai sumber literatur yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan dengan memanfaatkan beberapa database ilmiah seperti Google Scholar, SINTA, Portal Garuda, ResearchGate, serta repository perguruan tinggi dan sejumlah E-jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan yang menyediakan artikel ilmiah dalam bidang pembangunan daerah. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang sudah dirumuskan sebelumnya, yaitu: pembangunan partisipatif, kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, pembangunan daerah, governance, modal sosial, kolaborasi stakeholder, dan Pekanbaru. Kata kunci tersebut kemudian dikombinasikan dalam pencarian untuk mendapatkan sumber yang paling sesuai dengan fokus penelitian. Setiap artikel atau dokumen yang ditemukan melalui proses pencarian ini kemudian dibaca bagian ringkasannya (abstrak) terlebih dahulu sebagai tahap pengecekan awal. Hal ini dilakukan untuk menilai tingkat relevansi dan keterkaitan isi dokumen terhadap fokus penelitian. Literatur yang tidak sesuai dengan kriteria—misalnya tidak berhubungan dengan isu pembangunan lokal atau terbit terlalu lama—akan dieliminasi dari daftar sumber data.

Sementara itu, dokumen resmi pemerintah seperti RPJMD, data statistik wilayah, laporan pembangunan, serta peraturan daerah diunduh dari website instansi pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi pembangunan di Kota Pekanbaru secara faktual dan kontemporer. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar untuk memahami konteks aktual yang terjadi di lapangan, serta sebagai bahan triangulasi terhadap temuan literatur ilmiah. Setelah seluruh sumber yang relevan terkumpul, data di dalamnya dipilih dan diekstraksi berdasarkan topik pembahasan. Informasi penting yang berhubungan dengan kelembagaan lokal, tingkat partisipasi masyarakat, tantangan pembangunan, serta strategi penguatan governance kemudian dicatat dan dikelompokkan sesuai tema. Cara ini dilakukan untuk memudahkan proses sintesis data pada tahap analisis berikutnya.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Teknik analisis bersifat kualitatif dengan langkah: reduksi data (memilih bagian relevan), kategorisasi tema (misalnya peran, tantangan, strategi), dan sintesis tematik. Literatur dirangkum

dalam tabel ringkasan yang memuat metadata dan hasil temuan tiap sumber. Hasil sintesis kemudian disajikan dalam narasi tematik dalam artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil studi literatur yang dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi pemerintah Kota Pekanbaru dan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kelembagaan lokal seperti LPM, BKM, RT/RW, dan Karang Taruna telah menjalankan sebagian fungsi utama dalam mendorong pembangunan partisipatif, terutama pada aspek penyampaian aspirasi masyarakat, pendampingan program sosial, dan pengawasan pembangunan fisik di lingkungan.

Namun, kajian ini juga menemukan pola masalah yang konsisten dan berulang yang menghambat efektivitas peran tersebut. Secara ringkas, masalah utama bisa dikelompokkan menjadi empat kategori besar: (A) partisipasi yang bersifat seremonial, (B) kesenjangan kapasitas SDM kelembagaan, (C) keterbatasan akses informasi & transparansi, dan (D) keterbatasan pendanaan & sumber daya.

A. Partisipasi yang Bersifat Seremonial (Symbolic Participation)

Meski warga hadir pada forum Musrenbang atau pertemuan kelurahan, keterlibatan mereka kerap berhenti pada tahap “mengajukan usulan” tanpa keikutsertaan lebih lanjut dalam penentuan prioritas akhir, penganggaran, atau mekanisme evaluasi. Indikatornya: rendahnya persentase usulan warga yang terealisasi, tingkat kehadiran yang fluktuatif pada tahap tindak lanjut, serta sedikitnya bukti bahwa kelompok marginal (perempuan, difabel, keluarga miskin) diberi ruang spesifik untuk menyuarakan kebutuhan. Partisipasi yang simbolis melemahkan legitimasi kebijakan, menurunkan akuntabilitas, dan mengakibatkan program yang tidak tepat sasaran; konsekuensinya, upaya penanggulangan kemiskinan atau pemukiman kumuh menjadi kurang efektif meski ada program.

Penyebab :

1. Elite capture: tokoh lokal atau kelompok berpengaruh menguasai proses pengambilan keputusan sehingga suara mayoritas tidak terakomodasi.
2. Konsultasi sebagai formalitas: agenda Musrenbang dijalankan sekadar memenuhi prosedur administratif tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas.
3. Kelelahan konsultatif: warga yang sering diundang tapi jarang melihat hasil menjadi apatis.

Rekomendasi :

1. Terapkan partisipatory budgeting sederhana di beberapa kelurahan pilot (mis. kuota dana kelurahan untuk proposal warga yang dipilih bersama).
2. Gunakan indikator realisasi usulan warga sebagai metrik kinerja Musrenbang (mis. % usulan warga terealisasi per tahun).
3. Fasilitasi forum khusus untuk kelompok rentan (sesi terpisah, mediator independen).

B. Kesenjangan Kapasitas SDM Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal seringkali dibentuk secara struktural tetapi kekurangan kemampuan teknis: perencanaan anggaran, pengelolaan administrasi, monitoring proyek, hingga kemampuan advokasi. Indikatornya: rendahnya jumlah pelatihan yang diikuti pengurus LPM/BKM per tahun, dokumentasi rapat yang tidak rapi, dan kelemahan dalam menyusun proposal pendanaan. Kelembagaan tidak mampu mengelola program mandiri, bergantung pada intervensi pemerintah/NGO, sehingga keberlanjutan inisiatif lemah.

Penyebab :

1. Kurangnya program capacity building yang berkelanjutan.
2. Pola pelatihan terfragmentasi (sekali waktu, tidak berkelanjutan).
3. Beban kerja sukarelawan yang terbatas waktu.

Rekomendasi :

1. Rancang program pelatihan modular (manajemen organisasi, akuntabilitas, penggalangan dana, monitoring & evaluasi) bekerjasama dengan perguruan tinggi lokal.
2. Sistem mentoring: pairing LPM/BKM dengan dosen atau civil society untuk 6–12 bulan.
3. Sediakan toolkit digital sederhana (format proposal, laporan kegiatan, checklist monitoring).

C. Keterbatasan Akses Informasi & Transparansi

Akses publik terhadap data perencanaan, anggaran kelurahan, atau laporan proyek masih terbatas. Indikatornya: minimnya publikasi dashboard proyek kelurahan, ketiadaan papan informasi yang diperbarui, dan rendahnya penggunaan platform digital partisipatif. Informasi asimetris memperbesar peluang korupsi kecil-kecilan, menurunkan kepercayaan publik, dan menyulitkan warga untuk melakukan pengawasan.

Penyebab :

1. Infrastruktur TI yang belum merata di kelurahan.
2. Kultur administrasi yang belum mengedepankan keterbukaan.
3. Belum ada standar publikasi data yang sederhana dan ramah warga.

Rekomendasi :

1. Implementasikan e-Musrenbang sederhana + dashboard transparansi anggaran kelurahan; data minimal yang dipublikasikan: daftar usulan, status verifikasi, anggaran, pelaksana, tanggal mulai/selesai.
2. Buat papan pengumuman fisik + versi digital untuk tiap proyek di lingkungan (foto progres + laporan singkat).
3. Latih pengurus RT/RW untuk mengakses & menjelaskan data kepada warga (literasi data dasar).

D. Keterbatasan Pendanaan & Sumber Daya

BKM/LPM sering kekurangan dana operasional yang memadai sehingga kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inisiatif sulit berkelanjutan. Indikator: kegiatan pemberdayaan yang berhenti setelah proyek donor selesai; tidak adanya alokasi anggaran rutin untuk kelembagaan lokal. Inovasi lokal tidak berkembang; kapasitas kelembagaan tetap rendah; masyarakat kembali pasif setelah proyek selesai.

Penyebab :

1. Anggaran kelurahan yang terbatas dan prioritas yang berubah-ubah.
2. Kurangnya mekanisme pengalokasian dana partisipatif untuk kelembagaan.
3. Ketergantungan pada program satu kali (project-based) dari pusat/provinsi.

Rekomendasi :

1. Alokasikan persentase kecil dari Dana Kelurahan untuk “Dana Operasional Kelembagaan” dengan mekanisme pertanggungjawaban sederhana.
2. Fasilitasi akses BKM/LPM ke program pembiayaan mikro atau modal bergulir untuk inisiatif ekonomi lokal (BUMKel).
3. Dorong skema matching fund antara pemerintah kota dan CSR perusahaan lokal untuk kegiatan pemberdayaan berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini disusun berdasarkan sintesis teori Good Governance, Collaborative Governance, dan Pemberdayaan Masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kondisi aktual kelembagaan lokal di Kota Pekanbaru sebagaimana teridentifikasi dalam hasil studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa peran kelembagaan lokal sudah berjalan, namun masih terdapat kesenjangan besar antara konsep ideal yang ditetapkan teori dan implementasi di lapangan.

1. Analisis Berdasarkan Teori Good Governance

Konsep Good Governance menekankan bahwa pemerintahan yang ideal harus menerapkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, supremasi hukum, serta inklusivitas dalam pembangunan. Prinsip-prinsip itu mengarah pada pemenuhan hak publik untuk mengetahui, mempengaruhi, dan mengawasi pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks pembangunan Pekanbaru, khususnya pada skala lokal (kelurahan dan lingkungan RT/RW), prinsip-prinsip tersebut belum seluruhnya terinternalisasi dalam praktik. Peran kelembagaan lokal yang idealnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat belum optimal dalam memastikan keterlibatan warga yang bermakna di setiap tahap pembangunan. Dapat dilihat dari Tabel 5.1

Tabel 5. 1

Kondisi Teoretis	Realita Lapangan
Masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan	Partisipasi masih bersifat formalitas (Musrenbang ceremonial)
Kebijakan harus berbasis kebutuhan warga	Aspirasi sering tidak terakomodasi menjadi program utama

Informasi harus transparan	Akses data pembangunan masih sulit
----------------------------	------------------------------------

2. Analisis Collaborative Governance

Collaborative Governance dipahami sebagai mekanisme tata kelola yang melibatkan kerja sama antara berbagai aktor, yaitu pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, serta media, dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan publik. Kolaborasi lintas aktor ini memungkinkan pembangunan berjalan lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan karena setiap pihak membawa perspektif, kapasitas, dan sumber daya berbeda yang saling melengkapi. Namun berdasarkan literatur dan temuan dalam penelitian ini, kondisi implementasi Collaborative Governance di Kota Pekanbaru masih menunjukkan sejumlah kelemahan struktural dan kultural, yaitu:

Tabel 5. 2 Untuk mencapai tata kelola kolaboratif yang ideal, beberapa langkah penting perlu dilakukan:

Permasalahan	Dampak Nyata
Pemerintah terlalu dominan	Kolaborasi tidak berkelanjutan
Masyarakat tidak berdaya dalam perencanaan	Aspirasi tidak menjadi prioritas
Swasta & akademisi minim peran inovatif	Potensi inovasi publik terhambat
Tidak ada model kelembagaan kolaboratif	Tidak terjadi pembelajaran institusional

Tabel 5. 3

Elemen Kolaborasi	Perubahan yang Dibutuhkan
Struktur Kelembagaan	Pembentukan forum bersama multipihak secara permanen
Distribusi Peran	Setiap aktor diberi ruang dan otoritas sesuai kapasitas
Regulasi Pendukung	Aturan operasional kolaborasi yang jelas dan mengikat
Kapasitas Masyarakat	Pelatihan advokasi, perencanaan, dan monitoring
Inovasi Sumber Daya	Kemitraan pendanaan public swasta komunitas

3. Analisis Teori Pemberdayaan Masyarakat

Dengan jumlah warga miskin dan rentan yang signifikan, pemberdayaan masyarakat menjadi mutlak. Lembaga lokal harus tidak hanya menjadi fasilitator program, tetapi juga agent yang membantu warga memperoleh kapasitas, akses informasi, dan kemandirian dalam mengadvokasi pembangunan di lingkungan mereka. Namun laporan menunjukkan bahwa di banyak kasus, lembaga lokal belum memiliki kapasitas atau sumber daya untuk menjalankan fungsi ini secara optimal sehingga kewajiban pemerintah dan pemangku kebijakan lain menjadi penting untuk mendukung.

4. Perbandingan Temuan Dari Berbagai Penelitian.

Penelitian	Fokus / Lokasi / Inti Penelitian	Temuan Utama
Community Participation in Preparing the Village Government Work Plan (deskripsi partisipasi dalam penyusunan RKPDes)	Desa Krangkong, Bojonegoro perencanaan desa	Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja desa terjadi, terutama melalui konsultasi publik dan musyawarah; masyarakat terlibat hingga tahap perencanaan awal. (Jurnal Unesa)
Citizen Forum on Participatory Planning and Budgeting to Promote the Inclusive Village Governance (forum warga untuk perencanaan & penganggaran desa)	Desa Bajo, Bima, NTB	Citizen forum berhasil memperluas inklusivitas: kelompok perempuan dan warga biasa dilibatkan dalam perencanaan dan budgeting menunjukkan bahwa partisipasi dapat diperkaya jika difasilitasi dengan baik. (Jurnal)

<p>Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Nongkosawit</p>	<p>Kelurahan Nongkosawit, Semarang layanan & kelembagaan lokal</p>	<p>Unpkediri)</p>
<p>Village Governance and Public Participation in Indonesia</p>	<p>Studi nasional sejumlah desa evaluasi dana dan partisipasi desa</p>	<p>Banyak kasus menunjukkan partisipasi masyarakat sering bersifat simbolis (“tokenism”): forum dibuka tetapi aspirasi warga tidak otomatis dijadikan kebijakan; pembangunan lebih banyak ditentukan oleh elit lokal atau pemerintah desa. (jiscos.ub.ac.id)</p>
<p>Local Government Involvement in Participatory Development on Simpor Applications as Monitoring Media for Physical Development in East Belitung Regency</p>	<p>Kabupaten East Belitung penggunaan aplikasi untuk monitoring pembangunan partisipatif</p>	<p>Penerapan aplikasi partisipatif (digital) memungkinkan warga ikut memantau pembangunan fisik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung partisipasi & kontrol publik. (Jurnal UMPO)</p>

Tabel 5. 4

5. Perbandingan Temuan: Studi Terdahulu vs Kasus Pekanbaru

Aspek / Tema	Temuan Literatur	Temuan di Pekanbaru	Konsistensi / Perbedaan & Catatan
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat bisa dilibatkan sejak tahap penyusunan rencana (RKPDes) atau budgeting warga. (forum	Partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat formal/usulan tetapi implementasi usulan, penganggaran atau keputusan mayoritas tetap dikendalikan pemerintah.	Konsisten dengan literatur bahwa tanpa mekanisme kuat, partisipasi mudah bersifat simbolis. Kasus seperti forum di Bima atau Bojonegoro menunjukkan partisipasi substantif; ini jadi pembanding bahwa keberhasilan tergantung struktur & fasilitasi.
Kelembagaan lokal sebagai mediator pelayanan publik	Penguatan kelembagaan lokal (dengan capacity building & partisipasi warga) terbukti meningkatkan efektivitas layanan di kelurahan (Semarang).	Lembaga lokal ada dan aktif, tetapi kapasitas dan sumber daya terbatas sehingga peran mediator belum maksimal dalam jangka panjang.	Perbedaan muncul karena kapasitas & sumber daya. Literatur menunjukkan idealnya kelembagaan lokal bisa efektif jika didukung; Pekanbaru menunjukkan limit struktur nyata. Ini menggarisbawahi pentingnya pendanaan

			dan penguatan kelembagaan.
Risiko “tokenism” dalam partisipasi	Banyak penelitian melaporkan bahwa meskipun ada forum partisipatif, keputusan akhir tetap dikendalikan elit atau pemerintah aspirasi warga kurang diakomodasi.	Temuan di Pekanbaru menunjukkan pola serupa: partisipasi formal tapi kecenderungan keputusan tetap top-down, aspirasi warga tidak selalu terealisasi.	Konsisten. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi formal saja tidak cukup; perlu mekanisme yang menjamin representasi & realisasi aspirasi.
Transparansi & monitoring melalui teknologi / mekanisme partisipatif	Beberapa penelitian (contoh di East Belitung) menunjukkan bahwa aplikasi monitoring pembangunan (digital) membantu warga ikut memantau proyek, meningkatkan transparansi & akuntabilitas.	Di Pekanbaru, akses informasi publik dan transparansi pemberian / progres proyek masih rendah belum ada mekanisme digital atau publikasi terbuka yang memadai.	Perbedaan nyata menunjukkan bahwa potensi pemanfaatan teknologi belum dijalankan di Pekanbaru. Ini bisa menjadi rekomendasi konkret.
Efektivitas pemberdayaan dan otonomi lokal pasca desentralisasi	Studi di Bandung dan kasus lainnya menunjukkan bahwa desentralisasi memberi ruang bagi inovasi lokal dan partisipasi jika kapasitas lokal memadai.	Meskipun ada otonomi struktural (kelurahan, RT/RW), kelembagaan lokal di Pekanbaru belum sepenuhnya diberdayakan kendala pada kapasitas, pendanaan, maupun transparansi.	Menunjukkan bahwa desentralisasi saja tidak menjamin partisipasi atau pemberdayaan; perlu penguatan institusi dan sistem pendukung agar desentralisasi efektif.

SIMPULAN

Studi literatur ini menyimpulkan bahwa kelembagaan lokal seperti LPM, BKM, RTRW, dan Karang Taruna di Kota Pekanbaru berperan sebagai penghubung pemerintah-masyarakat dalam pembangunan partisipatif, khususnya mengomunikasikan aspirasi, pendampingan program, dan pengawasan, meskipun efektivitasnya terhambat oleh seremonial partisipasi, mencakup kapasitas SDM, transparansi transparansi informasi, serta minimnya operasional lembaga. Temuan ini sejalan dengan teori good governance, Collaborative Governance, dan pemberdayaan masyarakat, di mana kesenjangan antara konsep ideal dan realitas lapangan seperti elite capture, fragmentasi pelatihan, asimetris akses data, dan ketergantungan berbasis proyek menyebabkan pembangunan kurang inklusif dan berkelanjutan.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu di wilayah lain seperti Bojonegoro, Bima, dan Semarang menegaskan pola konsistensi partisipasi tokenisme serta potensi teknologi digital untuk transparansi, sementara Pekanbaru tertinggal dalam pemanfaatan inovasi seperti e-Musrenbang. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan penelitian pada penguatan kelembagaan berdasarkan data empiris primer, yang dapat dieksplorasi penelitian lanjutan melalui survei lapangan atau evaluasi program KOTAKU dan Dana Kelurahan.

Praktisnya, rekomendasi utama mencakup percontohan penganggaran partisipatif, pelatihan modular berkolaborasi universitas, dashboard e-Musrenbang, serta alokasi dana operasional 5-10% dari Dana Kelurahan untuk memastikan pembangunan daerah inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Data Statistik Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru.

- Citizen Forum on Participatory Planning and Budgeting to Promote the Inclusive Village Governance. (2022). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Universitas Nusantara PGRI Kediri. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM/article/view/16845>
- Community Participation in Preparing the Village Government Work Plan. (2021). *Jurnal SDG, Universitas Negeri Surabaya* <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsdg/article/view/35640>
- Febriantini, K. T., Indriani, N. K., Kusuma, B. O., & Yuniari, N. K. Y. (2019). Sinergitas pemerintah desa dan kelembagaan lokal subak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis subak sebagai warisan budaya dunia (studi kasus: Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan). *Spirit Publik*, 14(2), 189–202.
- Handini, N., Darwina, M., Yudistira, & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(5), 964–986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015–2025). *Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*. Pemerintah Indonesia.
- Local Government Involvement in Participatory Development on Simpor Applications as Monitoring Media for Physical Development in East Belitung Regency. (2022). *Aristo Journal*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/EYSS>
- Maharani, H. P., & Abubakar, R. R. T. (2024). Pembangunan desa berkelanjutan: Inovasi kolaborasi Program Masagi Bersih. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 131–144. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.131-144>
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2020–2025). RPJMD Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru. Penguatan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Nongkosawit. (2021). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/view/1000>
- Portal Garuda. (2015–2025). Artikel dan publikasi ilmiah terkait pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Sari, R. R., Siahainenia, R. R., & Hadiwijoyo, S. S. (2020). Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan kelurahan berkelanjutan berbasis agrowisata di Kumpulrejo, Kota Salatiga. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(2), 187–201. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.2.187-201>
- Tahrizi, F. A., & Darwis, R. S. (2024). Peran kelembagaan lokal dalam pendayagunaan sumber daya desa wisata. *Share: Social Work Journal*, 13(2), 248–258. <https://doi.org/10.45814/share.v13i2.51198>
- Village Governance and Public Participation in Indonesia. (2020). *Journal of Indonesian Community Studies*. <https://jiscos.ub.ac.id/index.php/jiscos/article/view/118>